

# Perencanaan Kesehatan Pusat, Daerah dan Keterlibatan Swasta

## Konteks dan Landasan Kebijakan

**RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan)** adalah pedoman strategis 5 tahunan, tertuang dalam Perpres, mengacu pada

### UU No. 17/2023 tentang Kesehatan – Pasal 409

- (3) Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

RIBK disusun oleh Menteri Kesehatan dan menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan.

### PP No. 28/2024 – Pasal 1135

#### Pasal 1135

- (1) Rencana induk bidang Kesehatan ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Penyusunan rencana induk bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Menteri dengan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga yang mendukung program Kesehatan.

RIBK dituangkan dalam Perpres, menjadi rujukan dokumen perencanaan pusat dan daerah.

**Tujuan:** Menyelaraskan rencana pusat & daerah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui prinsip “Kesehatan untuk Semua.”

## Konteks dan Landasan Kebijakan

### Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tata cara penyusunan RPJMD dan Renstra OPD

Pasal 51

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

**Pasal 22, 45, 51: wajib sinkronisasi dengan dokumen pusat**

### Inmendagri 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra

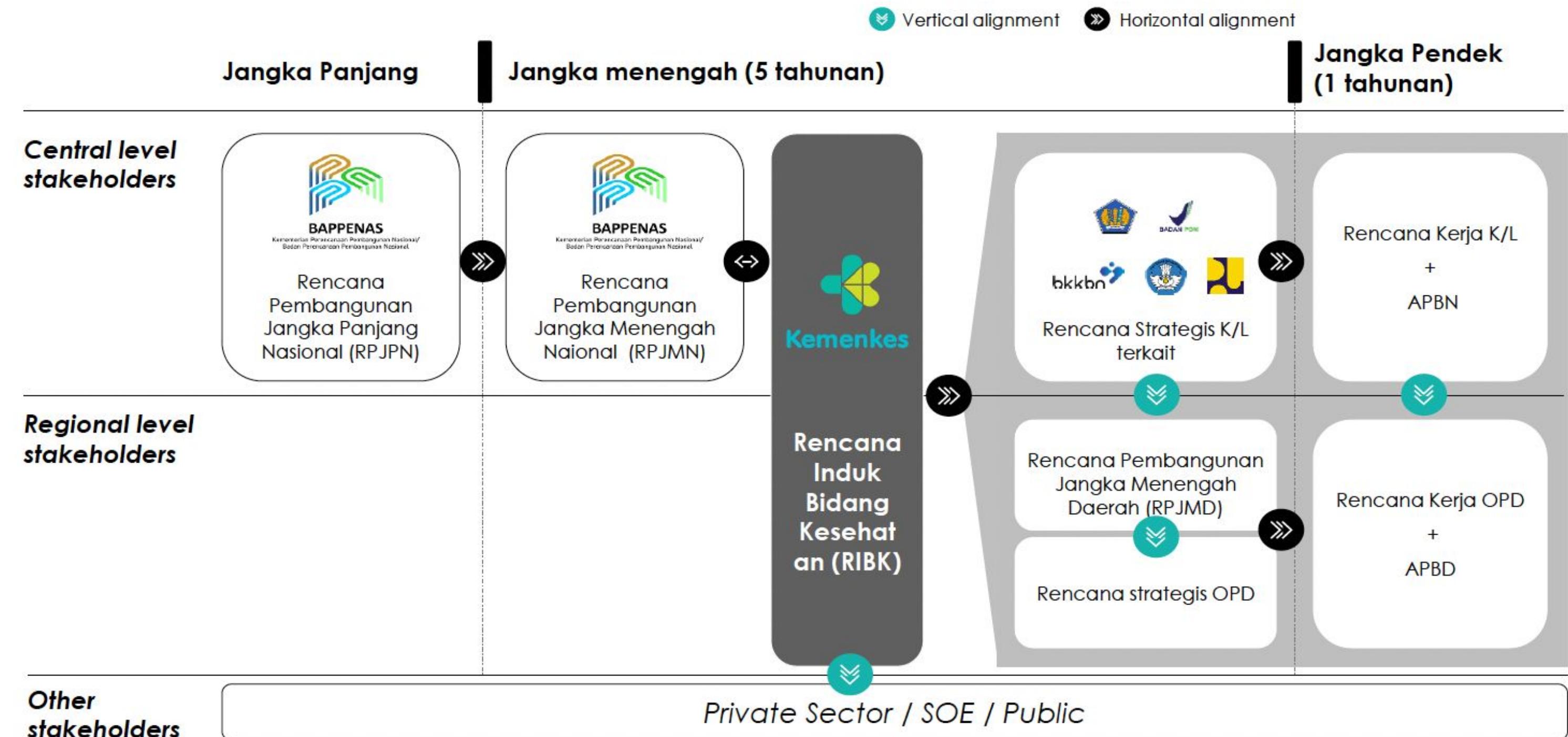
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

**Menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN 2025–2029**

## Konteks dan Landasan Kebijakan

### POSISI RIBK



sumber: Roren Kemenkes, April 2025

## Konteks dan Landasan Kebijakan

### Arah Kebijakan RIBK 2025-2029 sebagai penerjemahan RPJMN 2025-2029

**RPJPN**
**Kesehatan untuk Semua**
**RPJMN**
**Terwujudnya Kesehatan untuk Semua**

Indikator: Usia harapan hidup dan angka kelahiran total (TFR)

**PP 1**
**PP 2**
**PP 3**
**PP 4**
**PP 5**

Peningkatan  
Kesehatan dan Gizi  
Masyarakat

Pemberian Makan  
Gratis untuk  
Pemenuhan Gizi

Pengendalian Penyakit  
dan Pembudayaan  
Hidup Sehat

Penguatan Kapasitas  
Ketahanan Kesehatan

Penguatan Pelayanan  
Kesehatan dan Tata  
Kelola

**RIBK**
**Masyarakat yg sehat & produktif untuk Indonesia Emas 2045**

Indikator: UHH, HALE, UHC Coverage Index, TFR

**Sasaran  
Strategis 1**
**Sasaran  
Strategis 2**
**Sasaran  
Strategis 3**
**Sasaran  
Strategis 4**
**Sasaran  
Strategis 5**
**Sasaran  
Strategis 6**

Masyarakat Sehat

Komunitas Gaya  
Hidup Sehat

Layanan  
Kesehatan Baik,  
Adil, dan  
Terjangkau

Sistem Kesehatan  
yang Kuat

Tata Kelola dan  
Pembentukan  
Kesehatan

Teknologi  
Kesehatan yang  
Maju

sumber: Roren Kemenkes, April 2025

## Konteks dan Landasan Kebijakan

### 42 Indikator Sasaran Strategis untuk sektor Kesehatan Indonesia

Terdapat cascading indikator level program dan kegiatan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan

Vision					Indikator selaras daerah
Masyarakat yang sehat dan produktif untuk Indonesia Emas 2045					
① Usia Harapan Hidup	② Usia Harapan Hidup Sehat (HALE)	③ UHC – Service Coverage Index	④ Total Fertility Rate		
<b>Masyarakat Sehat</b>	<b>Komunitas Gaya Hidup Sehat</b>	<b>Layanan Kesehatan baik, adil dan terjangkau</b>	<b>Sistem Kesehatan yang kuat</b>	<b>Tata Kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif</b>	
<b>Maternal</b> ⑤ Angka Kematian Ibu ⑥ Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi ⑦ Unwanted Pregnancy <b>Infant and children</b> ⑧ Angka Kematian Balita ⑨ Prevalensi Stunting <b>Adolescent</b> ⑩ Prev Depresi pada usia ≥ 15 tahun <b>Seniors</b> ⑪ Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60) <b>Adults (+All age groups)</b> ⑫ Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ⑬ Persentase Kako mencapai target kekebalan kelompok ⑭ % cakupan PKG ⑮ Angka populasi bebas PTM ⑯ Angka populasi bebas PM	<b>Accessibility</b> ⑯ % penduduk dengan literasi kesehatan ⑰ Proporsi penduduk dgn aktivitas fisik yg cukup ⑲ Persentase Kako mencapai STBM ⑳ Prevalensi Obesitas	<b>Resilience</b> ⑳ Rasio Nakes dan Named terhadap populasi ㉑ Proporsi kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar ㉒ Proporsi faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar <b>Quality</b> ㉓ Proporsi faskes terakreditasi paripurna ㉔ Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	<b>Affordability</b> ㉕ Persentase belanja Kesehatan out of pocket ㉖ Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif	<b>Preparedness</b> ㉗ Nilai IHR dalam JEE	㉘ Proporsi jenis obat (termasuk vaksin) yang dapat diproduksi dalam negeri ㉙ Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri ㉚ % Sediaan farmasi yang aman dan bermutu ㉛ % Pangan olahan yang aman dan bermutu ㉜ % PIRT yang aman dan bermutu ㉝ Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kes lingkungan ㉞ Indeks alat Kesehatan memenuhi standar <b>Teknologi Kesehatan yang maju</b> ㉟ Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN ㉟ Proporsi populasi yang menggunakan SIKN ㉟ Peningkatan Kapabilitas Riset Kesehatan di Indonesia ㉟ Pertumbuhan Layanan Kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan

sumber: Roren Kemenkes, April 2025

## Sinkronisasi di Daerah

### Amanah Baru dalam RIBK:

- Pemerintah Daerah wajib mengadopsi indikator pusat yang ditetapkan secara nasional, dimuat:
  - RPJMD
  - Renstra OPD
  - RKPD
- Pengukuran dilakukan lewat indikator PP5 RPJMN: “Persentase kabupaten/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target.”

### Masalah Umum:

- Banyak RPJMD masih belum mencantumkan indikator strategis dari pusat
- Fragmentasi antara perencanaan kesehatan dan dokumen keuangan daerah
- Ketergantungan pada kepala daerah yang bisa berganti pasca-pilkada

### Perubahan Paradigma:

Dulu: *Fokus pada alokasi anggaran kesehatan ≥10% APBD*

### Kini:

- Berbasis kinerja dan indikator, sesuai arah RPJMN dan RIBK
- Wajib mencantumkan indikator RIBK dalam RPJMD dan Renstra OPD
- Penilaian penyelarasan dilakukan lintas K/L: Kemendagri – Kemenkes – Bappenas

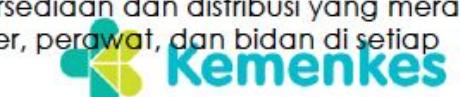
## Sinkronisasi di Daerah

### Rancangan Kinerja RIBK 2025-2029 yang diselaraskan dalam IKD RPJMD 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja Provinsi	Indikator Kinerja Kab/Kota	Keterangan
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	1 Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	Indikator RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 untuk mengukur dampak keberhasilan program pembangunan khususnya urusan kesehatan
	2 Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Indikator dampak pada RPJMN 2025-2029 dengan target pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil
	3 Angka kematian ibu	Jumlah Kematian Ibu	Penurunan angka kematian merupakan level outcome yang menjadi kinerja kepala daerah, serta AKI merupakan Indikator RPJPN 2025-2045
	4 Angka kematian balita	Jumlah kematian balita	Penurunan angka kematian merupakan level outcome yang menjadi kinerja kepala daerah
	5 Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Intervensi spesifik (kesehatan) berkontribusi hanya sebesar 30% dari keberhasilan program penurunan stunting, sehingga perlu menjadi kinerja kepala daerah, serta merupakan Indikator RPJPN 2025-2045
	6 Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Program Quick win Presiden yang dilaksanakan di pustekmas, sekolah, dan klinik dan merupakan kegiatan prioritas RPJMN 2025-2029
	7 Cakupan imunisasi bayi lengkap	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Menjaga kekebalan tubuh penduduk dari penyakit menular yang berbahaya, dan faktor non-kesehatan menjadi sangat berpengaruh dalam mencapai target kinerja
	8 Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Indikator RPJPN 2025-2045, serta untuk memastikan seluruh penduduk terlindungi asuransi kesehatan perlu menjadi kinerja kepala daerah
	9 Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	Indikator RPJPN 2025-20245 dan merupakan program quick win presiden 2025-2029.
	10 Persentase Hipertensi dalam pengendalian	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Menjaga penduduk yang hipertensi tetap terkendali melalui pengukuran secara berkala dan intervensi sesuai standar
Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	11 Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Mendorong program gerakan masyarakat untuk hidup sehat di seluruh sektor

## Sinkronisasi di Daerah

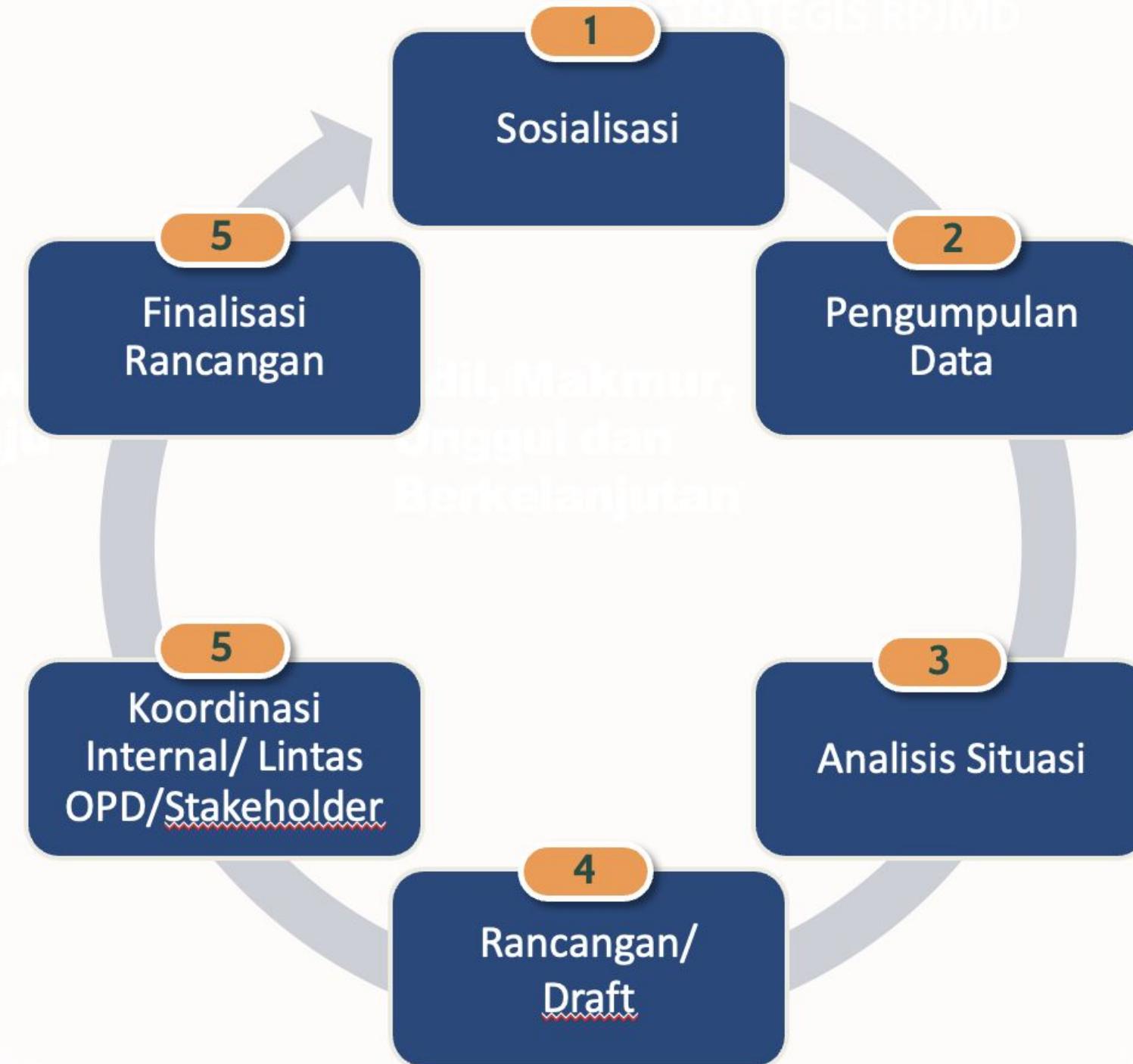
### Rancangan Kinerja RIBK 2025-2029 yang diselaraskan dalam kinerja Renstra OPD 2025-2029

Program	Outcome	Indikator Kinerja Provinsi	Indikator Kinerja Kako	Keterangan
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1 Prevalensi Depresi pada usia $\geq 15$ tahun	Prevalensi Depresi pada usia $\geq 15$ tahun	Peningkatan isu kesehatan jiwa yang menjadi tantangan kesehatan ke depan yang perlu diintervensi dan menjadi fokus urusan kesehatan
		2 Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Mengukur penerapan sanitasi pada lima pilar di level keluarga yaitu stop BABS, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan pangan, mengelola sampah, dan mengelola air limbah
		3 Prevalensi Obesitas $> 18$ tahun	Prevalensi Obesitas $> 18$ tahun	mengukur tingkat obesitas yang menjadi faktor risiko terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM, dan stroke
		4 Proporsi kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Mendorong kinerja daerah dalam menyediakan fasilitas kesehatan primer dan lanjutan yang sesuai standar pada item sarana, prasarana, dan alat kesehatan
		5 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan di faskes primer dan lanjutan
		6 Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Mendorong daerah untuk melakukan pengukuran kesehatan lingkungan di wilayahnya pada air minum, udara, dan pangan, serta penerapan kab/kota sehat.
		7 Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	Integrasi satu data kesehatan dari level fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS)
		8 Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	Akkreditasi level tertinggi (paripurna) yang ditargetkan dicapai oleh puskesmas dan RS pemerintah
		9 Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Memastikan ketersediaan obat, vaksin dan BMHP di faskes primer serta menjamin pelayanan kefarmasian sesuai standar
		10 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Memastikan ketersediaan dan distribusi yang merata dari tenaga dokter, perawat, dan bidan di setiap daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan			

sumber: Roren Kemenkes, April 2025

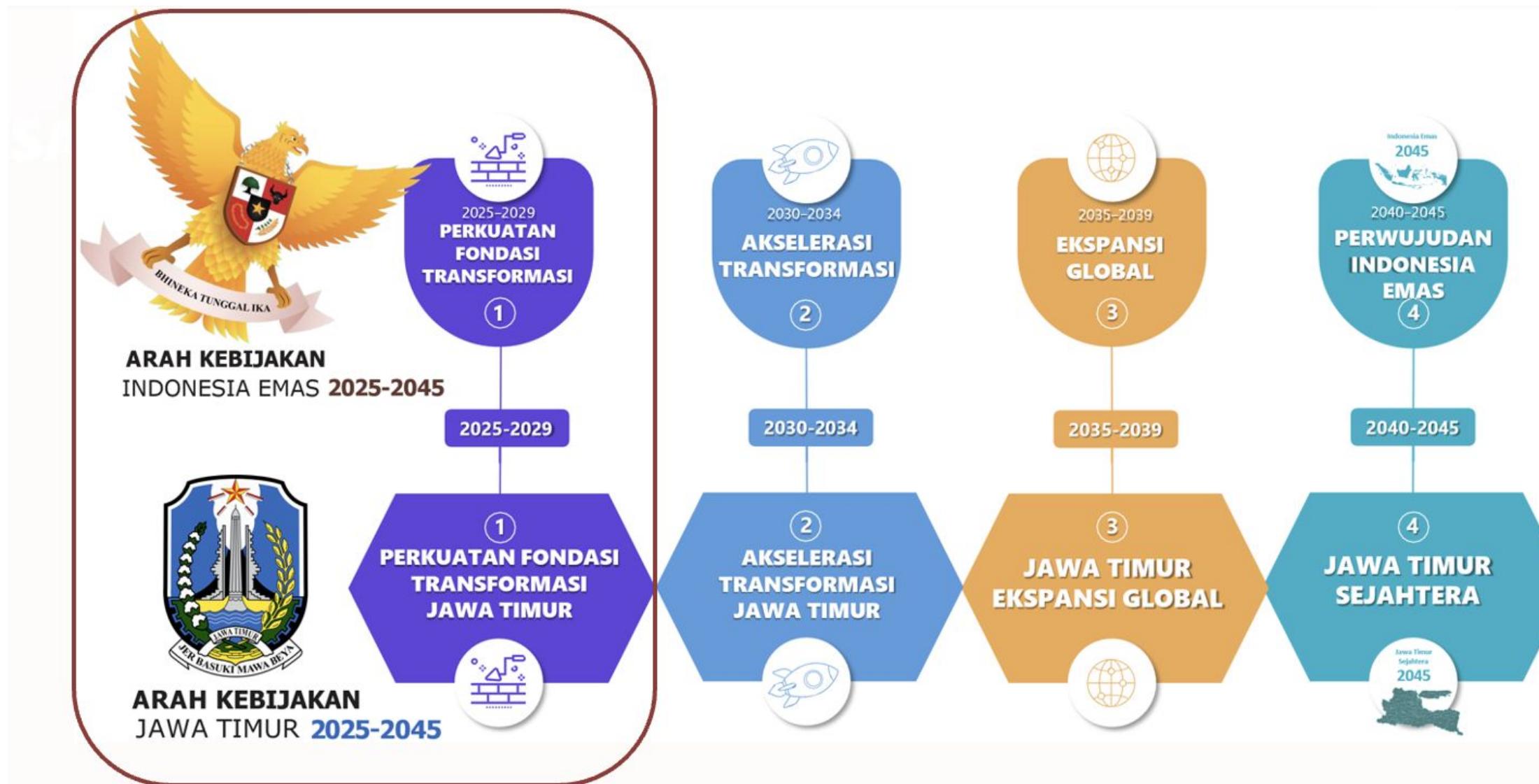
## Sinkronisasi di Daerah: Jawa Timur

**TAHAPAN  
PENYELARASAN RIBK,  
RPJMD, RENSTRA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur



**FOKUS:** Pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan sesuai kondisi wilayah, peningkatan kualitas pengajaran, produktivitas, daya saing, dan keahlian, serta pemenuhan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi dan berbasis satu data

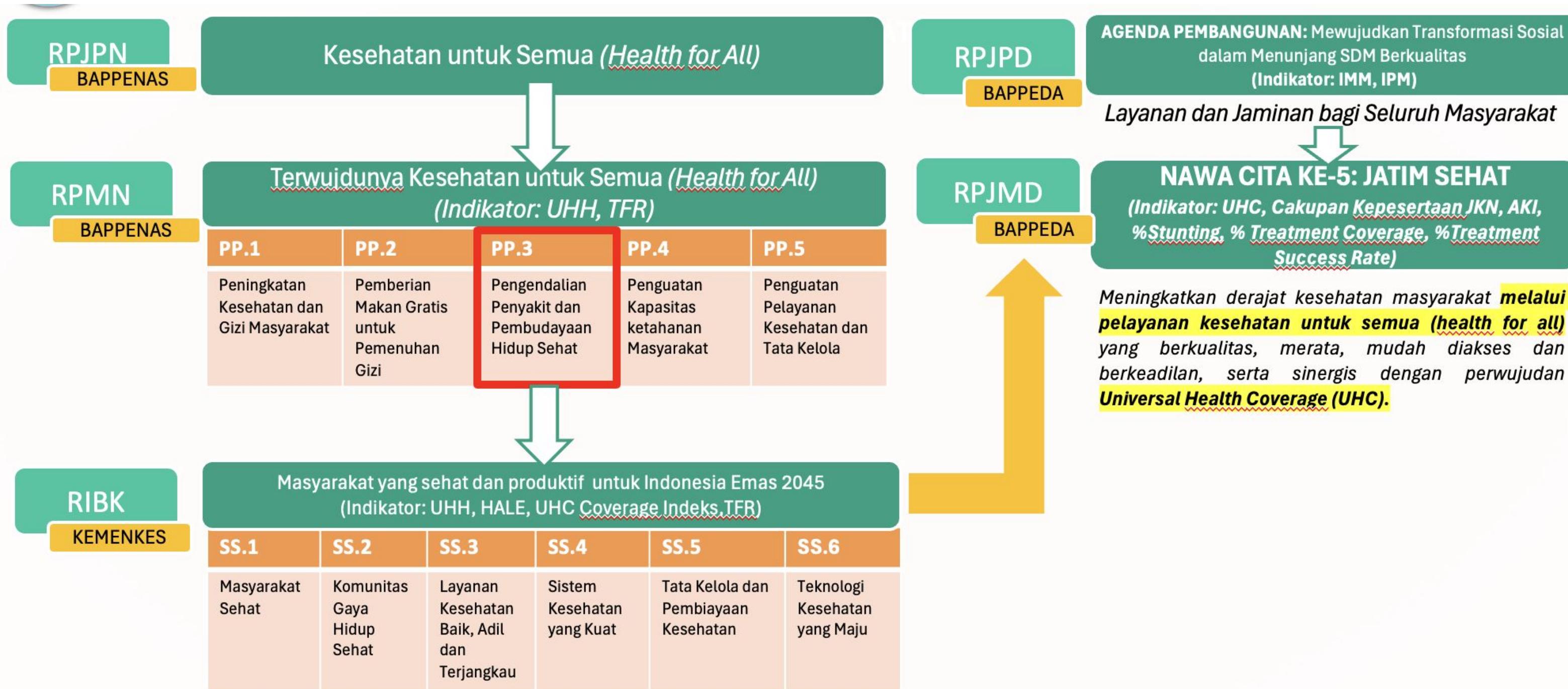
sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Strategi Kebijakan Provinsi Jawa Timur

- 1** Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
- 2** Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
- 3** Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- 4** Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
- 5** Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
- 6** Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
- 7** Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- 8** Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/incentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi Lainnya
- 9** Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
- 10** Percepatan penuntutan stunting dan pencegahan stunting
- 11** Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
- 12** Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga

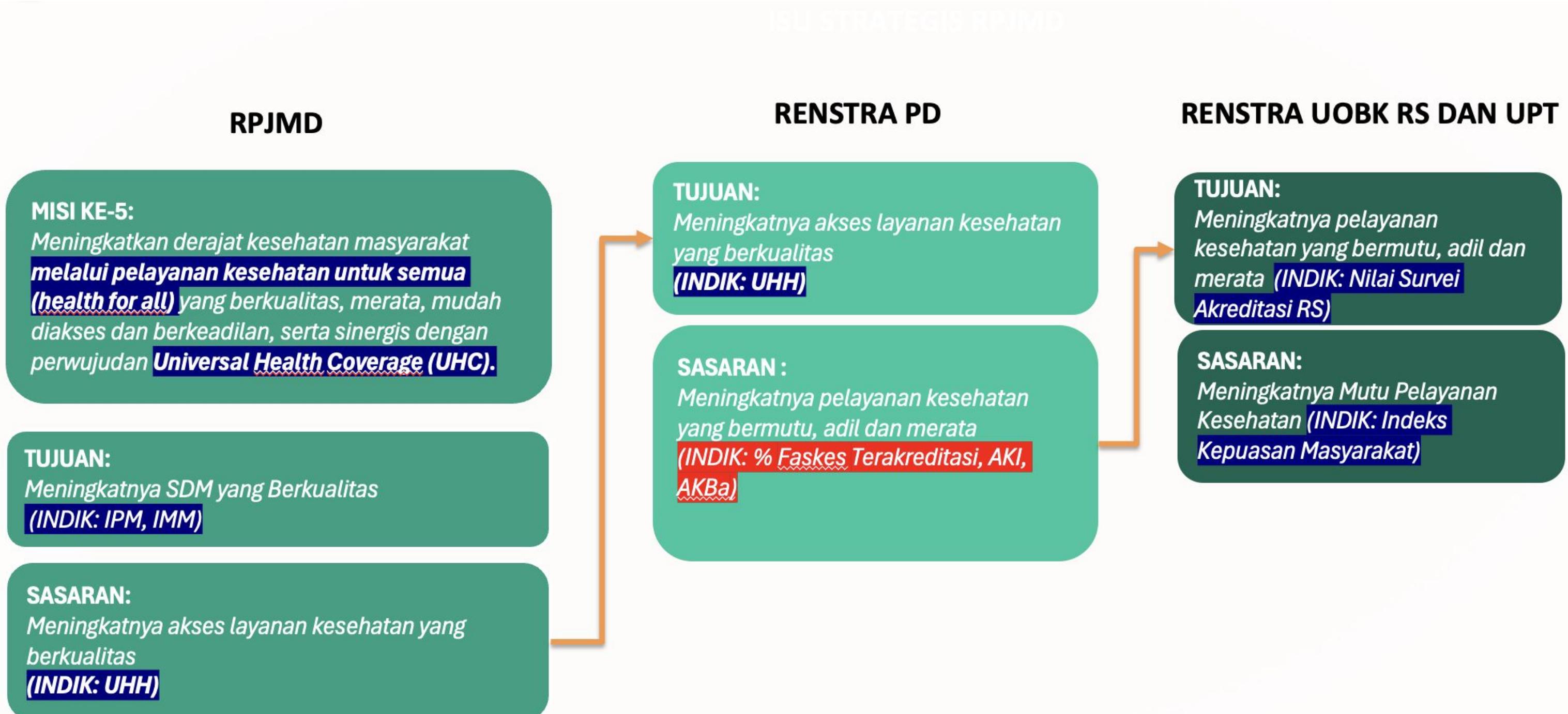
sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Timur



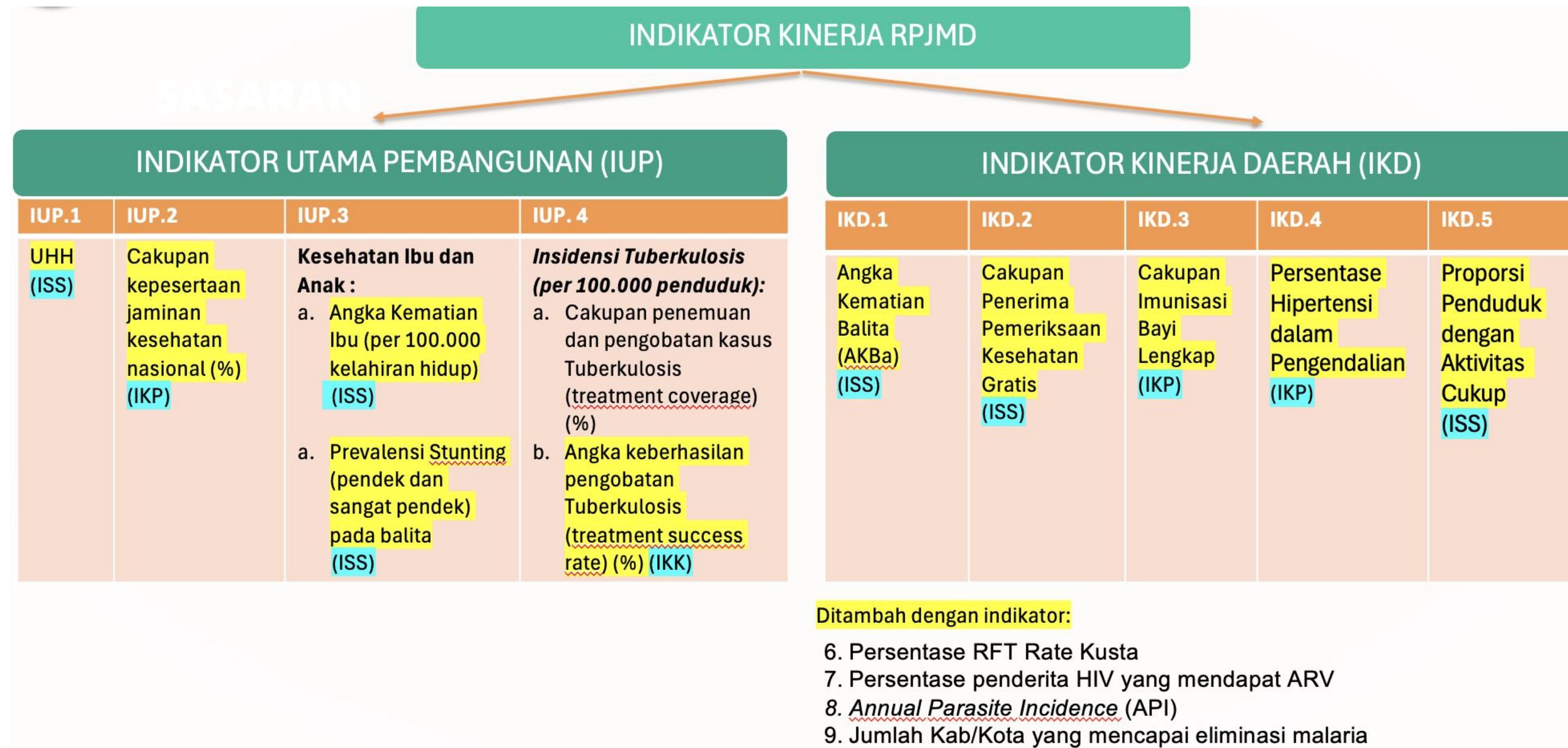
sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Cascading Tujuan dan Sasaran Provinsi Jawa Timur



sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Indikator RIBK Selaras RPJMD



sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Optimalisasi Penyelarasan dan Kualitas Perencanaan Provinsi Jawa Timur

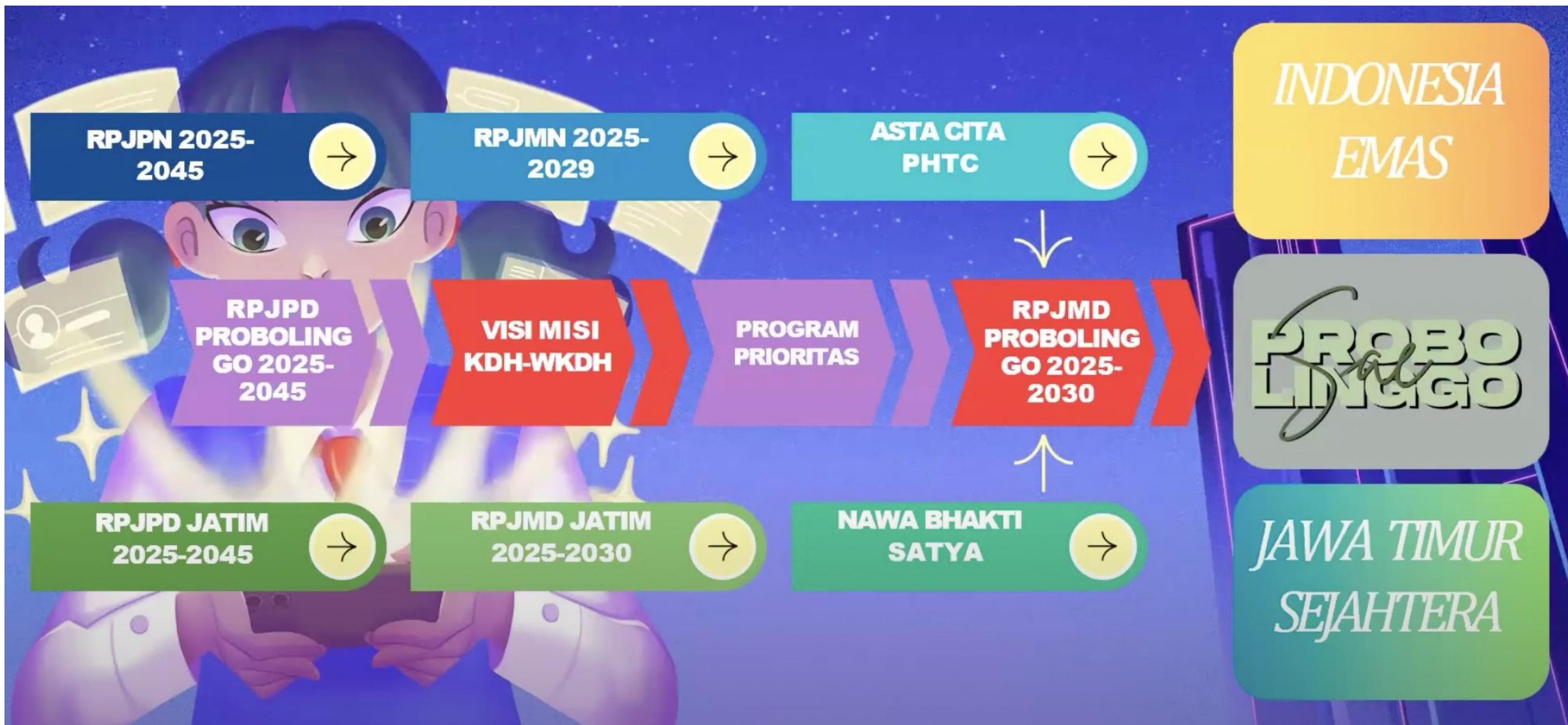
1. Dinas Kab/kota dapat menyelaraskan perencanaan daerah dengan provinsi serta pusat dengan berpedoman pada RIBK dan RPJMD Provinsi Jawa Timur
2. Penajaman analisis situasi sehingga mampu mengidentifikasi masalah utama dan menentukan wilayah utama intervensi.
3. Prioritasi anggaran diharapkan dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian masalah utama/prioritas daerah dengan lokus terpilih

### Agenda Koordinasi

1. Koordinasi dan Finalisasi Rancangan Renstra PD secara internal
2. Forum Komunikasi Publik Renstra PD .
3. Penyelarasan Renstra Dinkes dengan Dinkes Kab/Kota
4. Konsultasi Rancangan Renstra

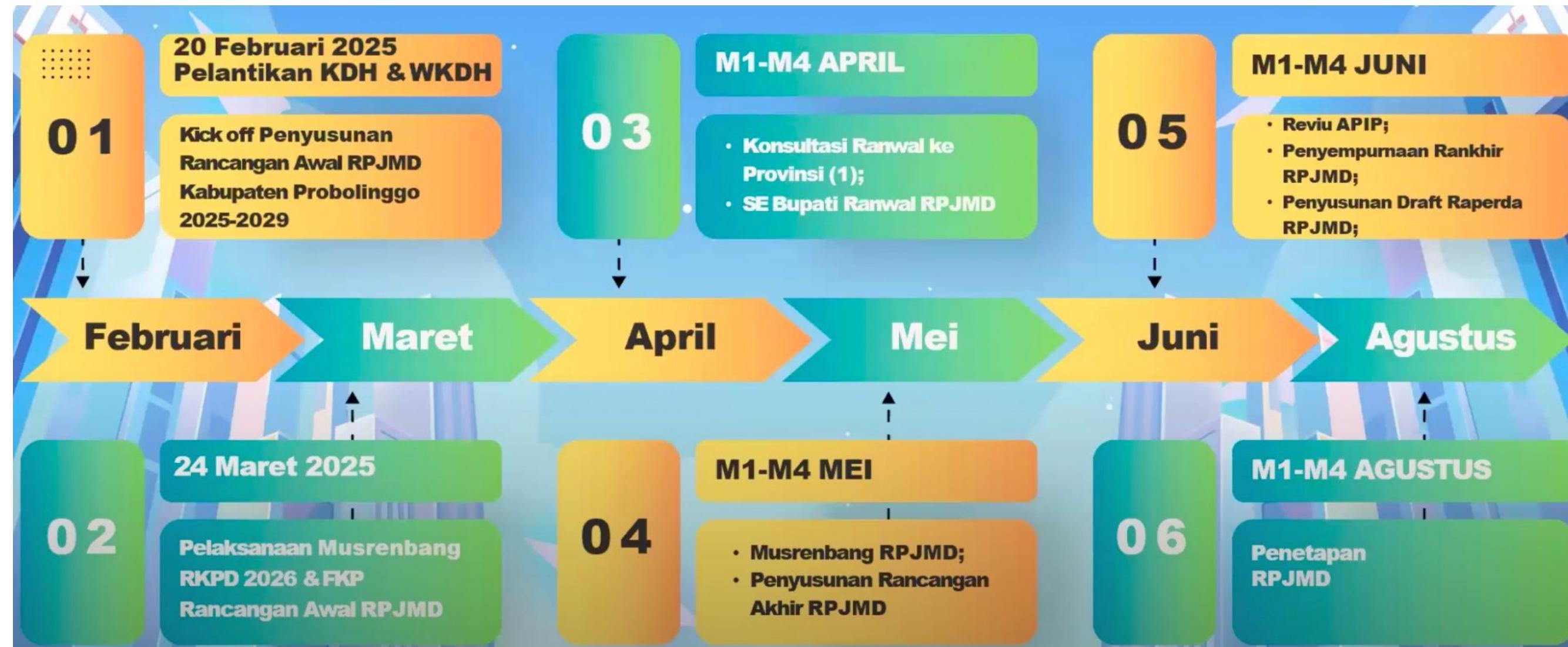
sumber: Dinkes Jatim, April 2025

## Sinkronisasi di Daerah: Kabupaten Probolinggo



sumber: Bapelitbangda Kab Probolinggo, April 2025

## Timeline Penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo



sumber: Bapelitbangda Kab Probolinggo, April 2025

Seharusnya sudah ada SE Bupati tentang Ranwal RPJMD → namun mengalami kemunduran

## Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Probolinggo

**3. Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN).**

SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau"

Kesehatan dan Kebutuhan dasar

**Sasaran 11**

Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat yang berbudaya dan rukun

22. IKUB

**Sasaran 12**

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan Merata

23. Indeks Pendidikan

**Sasaran 13**

Meningkatnya Derajat Kesehatan yang berkualitas dan Merata

24. Indeks Kesehatan

5 Misi, 15 Sasaran 28 Indikator



Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra PD	Indikator Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Sasaran Renstra PD	Keterangan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Derajat Kesehatan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan Merata	Usia Harapan Hidup (UHH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>IUP</li> <li>ISS RIBK</li> </ul>

sumber: Bapelitbangda Kab Probolinggo, April 2025

## Penutup

### Jawa Timur:

- Pendampingan RPJMD kabupaten/kota dengan:
  - Panduan harmonisasi indikator RIBK
  - Workshop teknis lintas sektor
- Inisiatif menyelaraskan indikator strategis ke Renstra OPD

### Probolinggo:

- Workshop penyusunan RPJMD dilaksanakan mundur, namun masih berusaha terus menyesuaikan dengan timeline yang seharusnya

- RIBK, Permendagri 86/2017, dan Instruksi Mendagri 2/2025 = **Pilar integrasi perencanaan kesehatan pusat dan daerah**
- Keberhasilan bukan hanya pada dokumen, tapi pada keselarasan implementasi dan kolaborasi lintas sektor.
- Keselarasan rencana = efektivitas implementasi = peningkatan derajat kesehatan